

UANG, KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL, SEJARAH BANI UMAYYAH

Mata kuliah: Sej. Pemikiran Ekonomi Islam

Dosen Pembimbing: Ali Topan, S.H.I, M.E.I



Disusun oleh:

- Nurul Afifah
- Yola Anjani
- Nuraini
- Zefry

**STAI Syekh H Abdul Halim Hasan Al-
Ishlahiyah
BINJAI**

TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
BAB I.....	IV
Pendahuluan.....	IV
A. Latar Belakang.....	IV
B. Pembatasan Masalah.....	IV
BAB II.....	1
Pembahasan.....	1
A. Uang.....	1
B. Kebijakan Moneter.....	2
C. Kebijakan Fiskal.....	5
D. Sejarah Bani Umayyah.....	9
BAB III.....	20
Penutup.....	20
A. Kesimpulan dan saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wata'ala, sepenuh langit dan bumi serta sepenuh sesuatu yang Dihendaki-Nya setelah itu. Shalawat dan berkah kepada Rasulullah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan juga keluarganya.

Alhamdulillah atas Izin dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul "Uang, Kebijakan Moneter dan Fiskal, Sejarah Bani Umayyah". Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mendukung dan membantu dalam proses pembuatan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini belum sempurna. Maka dari itu, kami membutuhkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan makalah ini.

Kw. Begumit, Februari 2016

Penulis

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perbankan bagi perekonomian modern telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh cikal bakal keuangan bagi perekonomian primitif ketika barter masih berlaku. Perbankan telah memudahkan pertukaran dan membantu pembentukan modal dan produksi yang berskala besar yang tiada taranya dalam sejarah umat manusia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali masalah yang timbul di dalam masyarakat pada zaman sekarang ini seperti masalah tentang asuransi, riba, kurs valuta asing yang ketentuan hukumnya masih belum jelas.

Melakukan kegiatan ekonomi merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi selalu mengalami perkembangan seperti termasyurnya lembaga permodalan yang dulunya tidak ada dan sekarang telah ada. Persoalan baru dalam fikih muamalat muncul ketika pengertian riba kepada persoalan perbankan. Riba atau bunga bank telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam khususnya di Indonesia banyak organisasi Islam yang tidak menyatakan tentang halalnya bunga bank tetapi ada kelompok tertentu yang mengelola badan permodalan semacam bunga bank.

B. Pembatasan Masalah

1. Definisi uang.
2. Definisi kebijakan moneter.
3. Definisi kebijakan fiskal.
4. Sejarah Bani Umayyah.

BAB II

Pembahasan

A. Uang

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.

Secara umum uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai alat satuan hitung, penimbun kekayaan atau sebagai alat standar pencicilan hutang. Kemudian uang biasanya hanya dapat dipergunakan dalam satu wilayah tertentu, misalnya negara, karena bisa saja satu mata uang tertentu tidak berlaku di negara lain dan sebaliknya, namun bisa saja satu mata uang negara tertentu berlaku di semua negara seperti mata uang US Dollar.¹

Berikut merupakan beberapa definisi dari uang menurut para ahli:

- a. Menurut Robertson: uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.
- b. Menurut R.S Sayers: uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar hutang.
- c. Menurut A.C Pigou: uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar.
- d. Menurut Albert Gailort Hart: uang adalah suatu kekayaan yang dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang dan jasa untuk pembayaran hutang.

Dari definisi Robert dan A.C pigou ia menekankan peranan uang sebagai alat pembayar atau sebagai alat penukar umum, sedangkan menurut Sayers dan Hart mereka lebih menekankan peranan uang sebagai alat pembayar hutang, hanya Rollin G.Thomas yang lebih luas definisinya

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Ed. Revisi. Cet. 15, hlm. 13.

ia menganggap uang sebagai sesuatu yang umum yang diterima sebagai alat pembayar atau alat penukar umum dan sebagai alat pembayar hutang.

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya uang, maka banyak sekali manfaat yang akan diperoleh, baik bagi pihak penerima uang maupun pembayar. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain:

1. mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat;
2. mempermudah dalam menentukan nilai (harga) dari barang dan jasa;
3. mempermudah proses perdagangan secara luas;
4. digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan.²

B. Kebijakan Moneter

1. Definisi Kebijakan Moneter (Monetary Policy)

Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.³

Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai (i) uang, (ii) ketersediaan uang, dan (iii) biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan

² *Ibid.*, hlm 14.

³ Godam64, "*Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal, Instrumen Serta Penjelasannya*", diakses dari <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya.html>, pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.55

moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Di mana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau di mana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Salah satu tujuan kebijakan moneter yaitu meningkatkan kesempatan kerja dan tujuan akhir dilaksanakannya kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim dunia usaha yang sehat sehingga investasi-investasi baru akan bermunculan. Adapun tujuan khusus dari kebijakan moneter adalah:

a. Menjaga stabilitas ekonomi

Dengan pengaturan dan pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akan tercipta, suatu keadaan perekonomian yang stabil.

b. Menjaga kestabilan harga

Volume jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh bank sentral melalui kebijakan moneter, maka tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali.

c. Meningkatkan kesempatan kerja

Jika perekonomian stabil, maka para investor tidak akan ragu-ragu meningkatkan jumlah produksi, mengembangkan investasi-investasi baru, dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja.

d. Memperbaiki neraca perdagangan luar negeri

Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus (ekspor lebih besar daripada impor). Dan dengan adanya devaluasi,

diharapkan nilai ekspor Indonesia akan meningkat sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus dan minimal menjadi balance.

3. Macam-macam Kebijakan Moneter

a. Politik diskonto

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank.

b. Politik pasar terbuka (open market policy)

Salah satu kebijakan politik yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah/mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga.

c. Kebijakan cadangan kas (cash policy)

Kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan/menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank-bank umum dalam rangka mengedarkan/memberikan kredit kepada masyarakat.

d. Kebijakan kredit selektif

Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat kredit ketat yang dikenal dengan 5C (character, collateral, capital, capacity, condition of economy).

e. Kebijakan sanering

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan (pemotongan) nilai nominal uang.

f. Kebijakan devaluasi dan revaluasi

Devaluasi ialah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing. Sedangkan revaluasi ialah kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai mata uang rupiah terhadap nilai mata uang asing dengan tujuan utama yaitu untuk memperbaiki

neraca perdagangan internasional. Dan diharapkan harga barang ekspor Indonesia akan menjadi murah di luar negeri sehingga nilai ekspor Indonesia meningkat dan neraca perdagangan menjadi surplus.

4. Peranan Kebijakan Moneter

Peranan kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Bank sentral diberi hak oktroi oleh pemerintah untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal. Bank sentral melalui kebijakan moneternya seperti: politik diskonto, politik pasar terbuka, kebijakan cash rasio dan kebijakan kredit selektif dapat mengatur serta mengendalikan jumlah uang yang beredar. Jadi peranan kebijakan moneter adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar.

C. Kebijakan Fiskal

1. Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.⁴

4 Dany fitriansyah, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian*, diakses dari <http://pisoftskill.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam.html>, pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.57.

- a. Pada sektor rumah tangga (RTK), di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dan lain-lain dari perusahaan. Kegiatan ekonomi dengan pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dan lain-lain. Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- b. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan dunia internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri.
- c. Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga di mana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor dunia internasional/luar negeri, di mana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. Dan untuk hubungan dengan perusahaan, dunia internasional mengeksport produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

2. Macam-Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang ditempuh oleh suatu negara yang satu mungkin dapat berbeda dengan negara lain. Bahkan kebijakan fiskal yang ditempuh oleh suatu negara saja mungkin dapat berlainan apabila situasi dan kondisinya berbeda.

Macam – macam kebijakan fiskal yang ditempuh dapat berupa:

- a. Sistem pajak progresif

Dalam sistem ini pembebanan pajak dilakukan dengan penggunaan persentase yang tidak sama, semakin tinggi pendapatan/kekayaan seseorang, maka semakin besar juga persentase beban pajaknya.

Sistem ini ada kebaikan dan kelemahannya. Kebaikannya antara lain adalah bahwa dengan cara ini mengurangi jumlah perbedaan pendapat orang yang kaya dengan golongan yang miskin dengan jalan mengurangi dari atas. Golongan kaya melalui pemerintah terpaksa memberikan sebagian kekayaannya, yang oleh pemerintah kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan sarana sosial. Kelemahannya antara lain adalah mendorong golongan yang berpenghasilan tinggi untuk menyulap kekayaan yang besar menjadi tidak besar, dan memasukkan segala macam kebutuhan pribadi, ke dalam ongkos-ongkos sehingga seolah-olah labanya menjadi sedikit. Karena labanya sedikit, pembebanan pajak kemudian juga sedikit.

b. Kebijakan dalam ekonomi terbuka

Sistem terbuka di sini berarti bersedia menerima pengaruh dari luar. Dengan terbukanya sistem ekonomi suatu negara, maka penanaman modal asing dapat diterima. Apabila dalam menghadapi masalah penanaman modal asing tersebut, dipertimbangkan masak-masak, akan dapat membantu pembangunan pada negara yang bersangkutan. Tetapi apabila tidak, maka justru akan terus dikuasai oleh pemilik modal asing, dengan perusahaan multi nasionalnya. Dengan sistem ekonomi terbuka, pengaruh konjungtur dunia dapat menggoyangkan perekonomian dalam negeri.

c. Kebijakan tabungan negara

Pada negara berkembang di mana sebagian besar masyarakatnya mempunyai penghasilan yang rendah, sulit mengadakan tabungan. Oleh karena itu tabungan hanya lebih dimungkinkan, apabila yang menjalankan itu negara. Tabungan negara dapat dimanfaatkan untuk pembentukan social overhead capital yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kelancaran usaha meningkatkan kehidupan sosial ekonomis.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Di mana tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya

pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan negara atau pengeluaran dan negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

d. Kebijakan anggaran/politik anggaran:

1) Anggaran defisit (defisit budget)/kebijakan fiskal ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

2) Anggaran surplus (surplus budget)/kebijakan fiskal kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3) Anggaran berimbang (balanced budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

D. Sejarah Bani Umayyah

1. Sejarah

Pengertian kata *Bani* menurut bahasa berarti anak, anak cucu atau keturunan. Dengan demikian yang dimaksud Bani Umayyah adalah anak, anak cucu atau keturunan Bani Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdu Syams dari satu keluarga. Kata *Dinasti* berarti keturunan raja-raja yang memerintah dan semuanya berasal dari satu keturunan. Dengan demikian, *Dinasti Umayyah* adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari Bani Umayyah.

Adapun istilah lain yang sering digunakan adalah kata *Daulah*, yang berarti kekuasaan, pemerintahan, atau negara. Dengan kata lain, Daulah Bani Umayyah adalah negara yang diperintah oleh Dinasti Umayyah yang raja-rajanya berasal dari Bani Umayyah.

Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah, adalah [kekhilafahan Islam](#) pertama setelah masa [Khulafa ar-Rasyidin](#) yang memerintah dari tahun [661](#) sampai [750](#) H di [Jazirah Arab](#) dan sekitarnya, serta di [Kordoba](#) ([Spanyol](#)). Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh [Umayyah bin Abdu asy-Syams](#), kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu [Muawiyah I](#).⁵

Masa Kekhilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun yaitu dimulai pada masa kekuasaan [Muawiyah bin Abu Sufyan](#) -radhiyallahu 'anhu-, di mana pemerintahan yang bersifat Islamiyyah berubah menjadi *monarchiheridetis* (kerajaan turun temurun), yaitu setelah [Hasan bin Ali](#)

5 Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet II, hlm. 167.

-radhiyallahu 'anhuma- menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada [Mu'awiyah bin Abu Sufyan](#) -radhiyallahu 'anhu-, dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya [Utsman bin Affan](#) -radhiyallahu 'anhu-, perang [Jamal](#) dan pengkhianatan dari orang-orang [Khawarij](#) dan [Syi'ah](#).

Suksepsi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika [Muawiyah bin Abu Sufyan](#) radhiyallahu 'anhu mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, [Yazid bin Muawiyah](#). [Muawiyah bin Abu Sufyan](#) -radhiyallahu 'anhu- bermaksud mencontoh monarki di [Persia](#) dan [Bizantium](#). Dia memang tetap menggunakan istilah [khalifah](#), namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya "*khalifah Allah*" dalam pengertian "penguasa" yang diangkat oleh [Allah](#).⁶

2. Ekonomi

Pada masa Bani Umayyah ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa. Dengan wilayah penaklukan yang begitu luas, maka hal itu memungkinkannya untuk mengeksploitasi potensi ekonomi negeri-negeri taklukan. Mereka juga dapat mengangkut sejumlah besar budak ke dunia Islam. Penggunaan tenaga kerja ini membuat bangsa Arab hidup dari negeri taklukan dan menjadikannya kelas pemungut pajak dan sekaligus memungkinkannya mengeksploitasi negeri-negeri tersebut, seperti Mesir, Suriah dan Irak. Tetapi bukan hanya eksplotasi yang bersifat menguras saja yang dilakukan oleh Bani Umayyah, tetapi ada juga usaha untuk memakmurkan negeri taklukannya. Hal ini terlihat dari kebijakan gubernur Irak yang saat itu dijabat oleh al Hajjaj bin Yusuf. Dia berhasil memperbaiki saluran-saluran air sungai Euphrat dan Tigris, memajukan perdagangan, dan memperbaiki sistem ukuran timbang, takaran dan keuangan. Jadi sumber ekonomi masa Daulah Bani Umayyah berasal dari potensi ekonomi negeri-negeri yang telah ditaklukan dan sejumlah budak dari negara-negara yang telah ditaklukkan diangkut ke dunia Islam.

Setelah Daulah Umawiyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak. Lalu lintas darat melalui jalan Sutera ke Tiongkok

6 Musyrifah Sunarto, Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta: Perkasa, 1999), Cet. V, hlm. 17.

guna memperlancar perdagangan sutera, keramik, obat-obatan dan wewangian. Perkembangan perdagangan itu telah mendorong meningkatnya kemakmuran bagi Daulah Umawiyah di bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada zaman Bani Umayyah terbukti berjaya membawa kemajuan kepada rakyatnya yaitu:

- a. Dalam bidang pertanian Umayyah telah memberi tumpuan terhadap pembangunan sektor pertanian, beliau telah memperkenalkan sistem pengairan bagi tujuan meningkatkan hasil pertanian.
- b. Dalam bidang industri pembuatan khususnya kraf tangan telah menjadi nadi pertumbuhan ekonomi bagi Umayyah.

Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan ekonomi banyak dibentuk berdasarkan ijtihad para fukaha dan ulama sebagai konsekuensi semakin jauhnya rentang waktu (lebih kurang satu abad) antara zaman kehidupan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masa pemerintahan tersebut.

Beberapa tradisi dan praktik yang di lakukan oleh Bani Umayyah pada masa Daulah al-Islam, yaitu:⁷

1. Ketika diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar kepada baitul maal, seperti; tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan yang di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin berlian pemberian Al Walid.
2. Selama berkuasa beliau juga tidak mengambil sesuatu pun dari baitul maal, termasuk pendapatan Fai yang telah menjadi haknya.
3. Memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Dalam rangka ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.
4. Dalam melakukan berbagai kebijakannya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz lebih bersifat melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.
5. Menghapus pajak terhadap kaum muslimin, mengurangi beban pajak kaum Nasrani, membuat aturan takaran dan timbangan, membasmi cukai dan kerja paksa.

7 <http://www.plusnetwork.com/?sp=chv&q=tradisi%20dan%20praktek%20pada%20masa%20ummayah>

6. Memperbaiki tanah pertanian, menggali sumur-sumur, pembangunan jalan-jalan, pembuatan tempat-tempat penginapan musafir, dan menyantuni fakir miskin. Berbagai kebijakan ini berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan hingga tidak ada lagi yang mau menerima zakat.
7. Menetapkan gaji pejabat sebesar 300 dinar dan dilarang pejabat tersebut melakukan kerja sampingan. Selain itu pajak yang dikenakan kepada non-muslim hanya berlaku kepada tiga profesi, yaitu pedagang, petani, dan tuan tanah.

Hubungan antara pusat dan daerah menjadi lemah, wibawa seorang khalifah menjadi hilang dan tidak lagi dihargai di mata bawahannya disebabkan gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta dan berfoya-foya. Pengelolaan Baitul Mal (harta kekayaan rakyat), di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa Bani Umayyah yang mana Baitul Mal ini beralih kedudukan menjadi harta kekayaan keluarga raja. Kecemburuan masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan kepada seorang khalifah.

3. Uang

Pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz, disamping beberapa uang perak Himyar yang bergambar burung hantu Attic. Umar, Muawiyah, dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar, dan mungkin pada beberapa kasus, terdapat kutipan ayat al-Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abd Al Malik, tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Abd Al Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab.⁸ Mata uang tersebut terbuat dari emas dan perak sebagai lambang kesamaan kerajaan ini dengan imperium yang ada sebelumnya. Ini adalah sistem penyamaan keuangan. Dia mengubah mata uang asing yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam.

4. Kebijakan Moneter

Sistem keuangan pada zaman Bani Umayyah (41/662-132/750), kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand dengan rasio kurs antara

⁸ Philip K. Hitti, *History of the Arab: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), hlm. 271.

dinar-dirham 1:12. Sedangkan pada masa Rasulullah nilai tukar emas dan perak relatif stabil dengan nilai kurs dirham-dinar 1:10.⁹

Pada masa Umayyah, Khalifah Abdul Malik mencetak mata uang kaum muslimi secara teratur. Pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang ini, walaupun pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dicetak mata uang, namun belum begitu teratur.¹⁰

5. Kebijakan Fiskal

Ada beberapa tambahan sumber uang pada zaman Dinasti Umayyah, seperti al-Dharaaib, kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara. Kepada penduduk dari negeri-negeri yang baru dilakukan, terutama yang baru masuk Islam ditetapkan pajak-pajak istimewa. Saluran uang keluar, pada masa Daulah Bani Umayyah pada umumnya seperti permulaan Islam. Yaitu untuk:

1. Gaji para pegawai dan tentara, serta biaya tata usaha Negara.
2. Pembangunan pertanian, termasuk irigasi dan penggalian terusan-terusan.
3. Ongkos bagi orang-orang tawanan perang.
4. Perlengkapan perang.
5. Hadiah-hadiah kepada para punggawa.

Pada dasarnya, tidak ada seorang muslim pun, dari bangsa mana pun, yang dibebani membayar pajak, selain zakat ataupun santunan untuk orang miskin, meskipun pada praktiknya, hak-hak istimewa sering diberikan kepada segelintir orang Islam-Arab. Berdasarkan teori itu, banyak orang yang baru masuk Islam, terutama dari Irak dan Khursan, mulai meninggalkan desa tempat mereka bekerja sebagai petani, dan pergi ke kota-kota, dengan harapan bisa bergabung menjadi prajurit mawali. Fenomena ini akhirnya menyebabkan kerugian ganda bagi perbendaharaan kerajaan. Hal tersebut karena setelah masuk Islam, pendapatan pajak sangat berkurang, dan setelah menjadi prajurit, mereka berhak mendapatkan subsidi. Al Hajj kemudian membuat kebijakan penting untuk mengembalikan orang-orang ke ladang-ladang mereka, dan kembali mewajibkan mereka membayar pajak tanah dan pajak kepala. Ia bahkan mengharuskan orang-orang Arab yang menguasai tanah di wilayah wajib pajak untuk membayar pajak tanah.¹¹

6. Kekhalifahan

9 Bagus Rizky sw, "*Makalah Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam*" diakses dari <http://colipekobbfb.blogspot.co.id/2015/03/makalah-kebijakan-moneter-dalam-ekonomi.html>, pada 12 Februari pukul 06.43.

10 Maidir Harun dan Firdaus, *Sejarah Peradaban Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 2001), hlm. 94.

11 Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 125.

Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abu Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 Hijriyah. Umat Islam membaiai Hasan setelah ayahnya itu wafat. Namun ia menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan 'Amul Jama'ah (Tahun Persatuan). Muawiyah menerima kekhalifahan di Kufah dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan, yakni:¹²

- a. agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun penduduk Irak
- b. menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka
- c. agar pajak tanah negeri Ahwaz diperuntukkan kepadanya dan diberikan tiap tahun
- d. agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain 2 juta dirham
- e. pemberian kepada Bani Hasyim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada Bani Abdis Syam.¹³

Muawiyah dibaiai oleh umat Islam di Kufah, sedangkan Hasan dan Husain dikembalikan ke Madinah. Hasan wafat di kota Nabi itu pada tahun 50 H.

Muawiyah bin Abu Sufyan dilahirkan sekitar 15 tahun sebelum H, dan masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah bersama-sama penduduk kota Mekah lainnya. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengangkatnya sebagai anggota siding dari penulis wahyu.

Dalam perjalanan sejarah hidupnya, ia diangkat sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dari sinilah karir politik Muawiyah bin Abu Sufyan dimulai. Setelah kemenangannya dalam peristiwa "Tahkim Daumatul Jandal" dan proses perdamaian yang dilakukan Hasan bin Ali dalam peristiwa "Ammul Jama'ah" mengantarkan Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dalam pemerintahan Islam.

Adapun langkah pertama yang dilakukannya adalah memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Disamping itu ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Muawiyah meninggal dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab Al-Shagier.

Gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sangat bertolak belakang dengan sistem kepemimpinan pada masa Khulafaurrosyidin. Pada masa ini sistem

12. Samsul Munir Amin, Op. cit, hlm. 122.

13. Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab* (Jakarta: Logos, 1997), Cet. I, hlm. 73

kepemerintahan yang digunakan adalah sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang berazaskan musyawarah dalam mengambil keputusan dan pemilihan pemimpin dilakukan oleh rakyat.

Dengan meninggalnya khalifah Ali bin Abu Thalib dari Khulafaur Rasyidin, maka bentuk pemerintahan Islam yang dirintis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam berubah dari sistem demokrasi menjadi monarkhi (kerajaan) yaitu seorang pemimpin yang menjadi raja diwariskan secara turun temurun berdasarkan jalur nasab atau keturunan. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh *Muawiyah Bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah*.¹⁴

Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. Sukseksi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah (memerintah 661-750) adalah orang yang bertanggung jawab atas sistem suksesi kepemimpinan dari yang bersifat demokratis dengan cara pemilihan kepada yang bersifat keturunan. Hal demikian ditentang oleh Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair yang kemudian meninggalkan Madinah, pertentangan ini melahirkan perang saudara kedua.¹⁵

Secara geneologis (garis keturunan) Muawiyah bin Abu Sufyan bertemu dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam pada Abdul Manaf. Keluarga Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dikenal dengan sebutan Bani Hasyim, sedangkan keluarga Umayyah disebut dengan Bani Umayyah. Nama-nama khalifah Bani Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, terdiri dari empat belas khalifah, yaitu:¹⁶

- a. Muawiyah bin Abu Sufyan (41-60 H/661-680 M)
- b. Yazid bin Muawiyah (60-64 H/680-683 M)
- c. Muawiyah bin Yazid (64-64H/683-683 M)
- d. Marwan bin Hakam (64-65 H/683-685 M)
- e. Abdul Malik bin Marwan (65-86 H/685-705 M)
- f. Al-Walid bin Abdul Malik (86-96 H/705-715 M)
- g. Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H/715-716 M)
- h. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H/716-720 M)
- i. Yazid bin Abdul Malik (101-105 H/720-724 M)
- j. Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H/ 724-743 M)
- k. Walid bin Yazid (125-126 H/743-744 M)

14. Samsul Munir Amin. op. cit, hlm. 124

15. Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Grafindo, 2013), Cet. XXIV, hlm. 45.

16. Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), Cet II, hlm. 121

- l. Yazid bin Walid (126-127 H/744-744 M)
- m. Ibrahim bin Walid (127-127 H/ 744-745 M)
- n. Marwan bin Muhammad (127-132 H/745-750 M)

Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah yang berkuasa selama lebih kurang 91 tahun, terdapat beberapa orang khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun nama-nama khalifah Bani Umayyah yang menonjol karena prestasinya adalah:

- a. Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan
- b. Khalifah Abdul Malik bin Marwan
- c. Khalifah Al Walid bin Abdul Malik
- d. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
- e. Khalifah Hisyam bin Abdul Malik

7. Wewenang Khalifah

Wewenang Khalifah begitu luas, selain memimpin, mengatur, mengawasi roda pemerintahan juga mengatur dan menguasai Baitul Mal. Pada masa Khulafaurrasidin Baitul Mal ini berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat, dimana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa Bani Umayyah yang mana Baitul Mal ini beralih kedudukan menjadi harta kekayaan keluarga raja.

Selain itu seorang khalifah mempunyai wewenang untuk membentuk, dan menentukan seorang figur pemimpin dalam sebuah lembaga-lembaga. Adapun lembaga-lembaga itu adalah:

- a. Membentuk *Diwanul Hijabah*, yaitu sebuah lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah.
- b. Membentuk departemen pencatatan atau *Diwanul Khatam*, yaitu lembaga yang bertugas untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah di dalam berita acara pemerintahan
- c. Membentuk Dinas pos atau *Diwanul Barid*, yaitu departemen pos dan transportasi, yang bertugas menjaga pos-pos perjalanan dan menyediakan kuda sebagai alat transportasi.
- d. Membentuk *Shahibul Kharraj* (pemungut pajak).

Selain hal-hal yang disebutkan di atas, masih banyak lagi wewenang seorang khalifah yaitu menentukan, mengawasi dan mendapatkan bagi hasil dari setiap wilayah (Gubernur) di

bawah kekuasaan kekhalifahannya.¹⁷ Khalifah juga berwenang mengangkat Majelis Penasehat sebagai pendamping, juga mengangkat beberapa orang sekretaris.¹⁸

8. Penolakan kekhalifahan Ali

Ketika Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah, Muawiyah menolak mengakui kekhalifahan Ali, dan ketika Ali tidak menghukum para pembunuh Utsman, Muawiyah menyatakan diri sebagai penuntut balas darah Utsman dan sekaligus sebagai pewaris jabatannya, maka terjadilah persaingan antara Bani Umayyah dan Bani Hasyim, konfrontasi kontak senjata antar keduanya itu terjadi di *Siffin* di perbatasan antara Suriah dan Irak. Dalam pada itu, Ali disamping mengalami penderitaan karena perlawanan dan kekuatan kaum Khawarij dan juga perlawanan dari para pengikutnya di Irak yang bersifat murtad dan munafik kepadanya serta enggan memberikan pertolongan.¹⁹

Ketika kemenangan hampir berada di pihak Ali, Amr bin As tangan kanan Muawiyah untuk bernegosiasi dengan mengangkat al-Quran untuk berdamai, perdamaian dilakukan dengan cara *Tahkim*, Amr bin As diangkat sebagai perantara dari pihak Muawiyah dan Abu Musa al Asyari dari pihak Ali. Mereka bermufakat untuk menurunkan kepemimpinan mereka masing-masing, akan tetapi keputusan dari pihak Muawiyah ternyata merugikan pihak Ali sehingga Ali menolaknya. Namun Ali sangat sibuk menenteramkan bagian-bagian wilayah yang mengakuinya sehingga tidak sempat memerangi Muawiyah. Sementara itu Muawiyah berhasil mengusir gubernur yang diangkat Ali dari Mesir yang kemudian mengirim pasukan untuk menyerbu Irak. Sebelum Ali bertindak untuk menghukum pembangkangan Muawiyah terhadap kepemimpinannya, salah satu lawan politiknya berhasil membunuh Ali dalam suatu tindakan menuntut balas.

9. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan Bani Umayyah di antaranya terdiri dari Majelis Penasehat sebagai pendamping, juga terdapat beberapa orang sekretaris untuk membantu pelaksanaan tugas seorang khalifah, yang meliputi:²⁰

17. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), Cet. III, hlm. 19

18. Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, hal. 131

19. A. Syalabi, *Sejarah kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka Al Husna 1988), Cet.V, hlm. 33.

20. Samsul Munir Amin, *ibid*

- a. Katib Ar Rasail, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan para pembesar setempat.
- b. Katib Al Kharraj, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara.
- c. Katib Al Jundi, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan ketentaraan.
- d. Katib As Syurtah, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
- e. Katib Al Qudat, sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan peradilan dan hakim setempat.

Untuk memperkuat pemerintahannya maka seorang khalifah juga mengangkat seorang gubernur yang handal, dan jujur kepadanya diantaranya Amru bin Ash diangkat menjadi gubernur Mesir, Mughirah bin Syu'bah menjadi gubernur di Kufah, Ziyad bin Abihi diangkat menjadi gubernur Bashrah.²¹

10. Sebab-sebab Kemunduran dan Kehancuran

Di antara yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Umayyah adalah:²²

- a. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut, tidak mengenal kompromi, pergantian khalifah hanya melalui garis keturunan.
- b. Gaya hidup mewah para khalifah, kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana yang menyebabkan rendahnya moralitas.
- c. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan Khalid, yang menyebabkan perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah.
- d. Banyaknya gerakan-gerakan pemberontakan selama masa pertengahan sampai dengan akhir pemerintahan Bani Umayyah.
- e. Pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing, sehingga pemerintahan Bani Umayyah kesulitan mempertahankan keutuhan negaranya.

Keruntuhan Bani Umayyah ditandai dengan kekalahan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran *Zeb Hulu* melawan pasukan Abu Muslim al Kurasani pada tahun 748 M. Pada peristiwa itu terjadi pembersihan etnis terhadap anggota keluarga Bani Umayyah.²³

Sebab-sebab keruntuhannya sebagai berikut :

21. A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* Jilid 2, hal. 42

22. Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Grafindo, 2013), Cet. XXIV, hlm. 48.

23. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), Cet. III, hlm. 122.

- a. Terjadinya persaingan kekuasaan di dalam anggota keluarga kerajaan.
- b. Tidak ada pemimpin politik dan militer yang handal yang mampu mengendalikan kekuasaan dan menjaga keutuhan negara.
- c. Munculnya berbagai gerakan perlawanan yang menentang kekuasaan Bani Umayyah, antara lain gerakan kelompok Syi'ah, serangan pasukan Abu Mulim al Khurasani dan pasukan Abdul Abbas ke pusat- pusat pemerintahan dan menghancurkannya.

BAB III

Penutup

A. Kesimpulan dan saran

1. Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran, dan digunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar juga sebagai pembayar hutang.
2. Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
3. Sejarah Bani Umayyah bermula dari krisis kepemimpinan yang melanda umat Islam pasca wafatnya Khalifah Ali bin Abu Thalib. Keadaan umat Islam menjadi semakin bertambah buruk karena adanya kekosongan kekuasaan. Kemudian Hasan bin Ali yang dibai'at sebagai khalifah sesudahnya, menolak bai'at tersebut dan membuat perjanjian dengan Muawiyah. Perjanjian tersebut berisi tentang diizinkan Muawiyah untuk menjadi seorang khalifah. Fase ini pun akhirnya menjadi era baru bagi pergantian kepemimpinan di tubuh umat Islam pada saat itu. Masa keemasan Bani Umayyah pun dimulai dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan umat Islam. Kemudian terlihat dari pesatnya pembangunan di berbagai bidang seperti pencetakan mata uang sendiri, penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi umat Islam, serta pembangunan jalan, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah. Akhirnya masa keemasan tersebut pun menjadi sirna akibat ulah para pemimpin dalam Bani Umayyah sendiri. Sifat yang selalu mementingkan latar belakang etnis politis, hingga sifat lemah dan bermoral buruk menjadi akhir dari masa kegemilangan Bani Umayyah. Kekuasaan ini pun akhirnya digantikan oleh Bani Abbasiyah pada 750 M.

4. Dengan mengetahui penjelasan uang, kebijakan moneter dan fiskal, dan sejarah Bani Umayyah hendaklah kita sebagai pelaku ekonomi tidak sewenang-wenang atau berbuat curang agar terciptanya perekonomian yang maju, dan juga bagi kalangan pemerintah agar senantiasa mengamati perkembangan ekonomi di negara ini agar kondisi ekonomi tetap stabil

DAFTAR PUSTAKA

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Godam64, *Definisi/Pengertian Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal, Instrumen Serta Penjelasannya*, diakses dari <http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-kebijakan-moneter-dan-kebijakan-fiskal-instrumen-serta-penjelasannya.html>, pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.55.

Dany fitriansyah, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian*, diakses dari <http://pisoftskill.blogspot.com/2011/05/kebijakan-fiskal-dan-moneter-dalam.html>, pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 11.57.

Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ali Mufrodi, *Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos, 1997.

Musyrifah Sunarto, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Perkasa, 1999.

Badri Yatim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Grafindo, 2013.

Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.

Syalabi, *Sejarah kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988.

Philip K. Hitti, *History of the Arab: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.

Bagus Rizky sw, *Makalah Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, diakses dari <http://colipekobbf.blogspot.co.id/2015/03/makalah-kebijakan-moneter-dalam-ekonomi.html>, pada 12 Februari pukul 06.43.